

## PERBANDINGAN INDONESIA DAN NEPAL DALAM KONDISI GEOGRAFIS, DISTRIBUSI LAYANAN PUBLIK DAN PERKEMBANGAN INFRASTRUKTUR

Bagus Prasetiyono<sup>1\*</sup>, Galih Putra Kusuma<sup>2</sup>, Allena Jasmine Putri Huda<sup>3</sup>, Moh musleh<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah

\*Corresponding author: bagusprasetiyono012@gmail.com

### **Abstract**

*Indonesia and Nepal are developing countries in Asia with contrasting geographical characteristics that influence infrastructure development and public service distribution. Indonesia is an archipelagic country with vast maritime areas and dispersed islands, while Nepal is a landlocked mountainous country dominated by the Himalayan region. These geographical differences create distinct challenges in ensuring equitable infrastructure development and public service delivery. This study aims to analyze the relationship between geographical conditions, infrastructure development, and public service distribution in Indonesia and Nepal through a comparative literature review. The study employs the perspective of territorial governance, which emphasizes that public policies and infrastructure strategies should be adapted to regional spatial characteristics, demographic conditions, natural resources, and disaster risks. Data were collected from academic literature, international reports, and previous studies concerning infrastructure development and public service governance in both countries. The findings indicate that geographical conditions significantly affect infrastructure accessibility and the distribution of public services. In Indonesia, the archipelagic structure increases transportation and connectivity costs across islands, while in Nepal, mountainous terrain constrains road construction and regional accessibility. Both countries have implemented decentralized governance approaches to address these challenges, supported by local government initiatives and development partners. However, disparities in service accessibility remain evident, particularly in remote and geographically isolated areas. This study concludes that geography is a critical determinant of infrastructure development and public service distribution. Effective territorial governance, adaptive infrastructure planning, and geographically sensitive public policies are essential to reducing regional disparities and improving public service accessibility in developing countries.*

*Keywords: public service distribution, infrastructure development, geography, Indonesia, Nepal.*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia dan Nepal adalah kedua negara berkembang yang berada dalam benua Asia dengan kondisi geografis dan topologi wilayah kedua negara memiliki perbedaan yang mencolok, negara Indonesia dengan negara Kepulauan yang memiliki wilayah lautan dan wilayah daratan dengan mayoritas wilayah perairan sedangkan negara Nepal memiliki topologi daerah pegunungan dengan mayoritas wilayah pegunungan. geografis dan topologi wilayah. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan iklim tropis dan di wilayah garis khatulistiwa dengan 3 zona waktu, sedangkan Nepal adalah negara pegunungan tertutup daratan (landlocked) tanpa adanya wilayah perairan yang terletak di kawasan Himalaya dengan iklim

sub tropis dan sebagian tropis dengan standar waktu Nepal. penelitian ini mengenai letak geografis dalam perbandingan pembangunan infrastruktur dan dampak distribusi penyediaan layanan publik di Indonesia dan Nepal, penelitian tentang Nepal banyak menitik beratkan pada dampak topografi pegunungan terhadap pembangunan infrastruktur transportasi dan konektivitas antar wilayah (Shrestha & Pandey, 2020; Dhungana, 2022), melalui governance berbasis kewilayahan (territorial governance) Pendekatan ini menekankan bahwa kebijakan publik dan pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan karakteristik spasial wilayah, baik dari sisi sumber daya alam, demografi, maupun potensi risiko bencana (Brenner, 2004), mitra pembangunan telah terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan sebagai mitra pemerintah Dukungan ini memperkuat pemerintah daerah terutama di bidang infrastruktur, (Keshav K. Acharya, 2018).

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan desentralisasi pelayanan publik yang adaptif terhadap kondisi geografis. beberapa studi perbandingan internasional yang ada (misalnya World Bank, 2021; UNDP, 2023) lebih berfokus pada indikator makro seperti indeks pembangunan manusia (IPM) dan pencapaian SDGs, tetapi belum mendalami mekanisme kebijakan dan strategi tata kelola layanan publik yang spesifik terhadap geografis masing-masing negara. Penelitian sebelumnya lebih menyoroti ketimpangan antar wilayah secara domestik, sedangkan studi komparatif lintas-negara dengan fokus pengaruh geografis terhadap pemerataan dampak pelayanan publik masih jarang dilakukan. berdasarkan studi kondisi geografis dengan kesenjangan pemerataan pelayanan publik pada negara kepulauan versus negara pegunungan, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang hubungan antara faktor kondisi geografis dan tata kelola wilayah dalam pemerataan layanan publik di negara berkembang. berupaya dengan melakukan analisis komparatif berbasis literatur antara Indonesia dan Nepal, guna mengidentifikasi pola keterkaitan antara faktor geografis, distribusi pelayanan publik, dan strategi pembangunan infrastruktur. geografis di kedua negara memiliki dampak yang signifikan terhadap ketimpangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dan distribusi pelayanan publik sesuai dengan temuan kajian literatur studi kedua negara menunjukkan bahwa kondisi geografis yang sangat berbeda antara Indonesia dan Nepal memberikan tantangan khas dalam distribusi layanan publik dan pembangunan infrastruktur.

## **METODE**

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur artikel jurnal ilmiah, sumber literatur relevan. Pengelolaan data menggunakan teori (miles dan Huberman 1992:15-20) meliputi : pengumpulan data dengan menelusuri literatur dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan resmi pemerintah Indonesia dan Nepal, serta publikasi lembaga internasional seperti World Bank, UNDP, dan ADB. seleksi literatur dilakukan berdasarkan kriteria inklusi: (1) literatur yang relevan dengan topik perbandingan geografis dan tata kelola layanan publik; (2) memiliki sumber data yang dapat diverifikasi; dan (3) memberikan hasil empiris atau kebijakan yang dapat dibandingkan antarnegara. literatur yang tidak memenuhi

kriteria tersebut dieliminasi. analisis data dilakukan dengan menggunakan reduksi data, yaitu menyeleksi dan mengelompokkan informasi utama dari setiap sumber; penyajian data, berupa tabel perbandingan dan uraian naratif antara kondisi Indonesia dan Nepal serta penyusunan kesimpulan dengan triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Geografi Indonesia dan Nepal

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di garis khatulistiwa, yang membentang antara Benua Asia dan Australia serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik, letak Astronomi 6° LU (Lintang Utara) – 11° LS (Lintang Selatan) dan 95° BT (Bujur Timur) – 141° BT (Bujur Timur), perbatasan wilayah sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan laut Cina selatan dan samudra Pasifik., sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. sebelah selatan dan Barat berbatasan dengan samudra hindia.



Gambar 1 Peta Indonesia Sumber Web World Atlas

Posisi berada di wilayah iklim tropis dilewati garis khatulistiwa dengan dua musim, yaitu musim kemarau (maret-agustus), musim hujan (september-februari) dan memiliki tiga zona waktu Indonesia barat, waktu Indonesia tengah, waktu Indonesia timur, sesuai dengan letak geografis dan letak astronomi wilayah teritorial negara Indonesia yang sangat luas dan terdiri pulau-pulau besar seperti Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi, dan Irian serta kepulauan kecil yang tersebar dengan sebaran geografis dan topografi di masing-masing wilayah membentuk suku yang menempatinnya dengan keanekaragaman karakter sosial dan budaya serta potensi sumber daya alam kekayaan flora dan fauna dengan daerah kepulauan, daerah pesisir, selat yang memisahkan antar Pulau, pantai hingga laut, dataran rendah hingga dataran tinggi dan pegunungan puncak yang menjulang menciptakan iklim salju di puncak gunung Jayawijaya, iklim tropis lembab di dataran rendah, iklim kering di daerah bayangan hujan dan iklim hujan tropis ada di daerah yang terkena angin hujan perbedaan kondisi geografis menyebabkan disparitas dan tantangan besar dalam distribusi layanan publik dan

pembangunan infrastruktur serta aksesibilitas penerimaan pelayanan publik, jaringan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air bersih, terutama wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang memiliki keterbatasan sumber daya dengan aksesibilitas rendah



Gambar 2 Peta Nepal Sumber Web World Atlas

Nepal adalah negara daratan yang terletak di antara pegunungan Himalaya dan dataran rendah Terai dengan batas wilayah sebelah utara Republik Rakyat Tiongkok, Selatan India, Barat India, Timur India dengan letak astronomis negara ini terletak di Benua Asia selatan Letak astronomi  $26^{\circ}$ LU hingga  $31^{\circ}$ LU dan  $80^{\circ}$ BT hingga  $89^{\circ}$ BT, zona waktu standar Nepal, iklim subtropis dan sedikit iklim tropis. geografis Nepal terdiri dari tiga wilayah Himal, Pahad dan Terai. Himal dengan wilayah pegunungan yang terdapat salju di Pegunungan himalaya besar. Dengan puncak Gunung Everest (Sagarmāthā dalam Nepali) mencapai 8.848 meter diatas permukaan laut yang perbatasan Nepal-China, dataran rendah selatan, Terai yang merupakan daerah perbukitan yang berbatasan dengan India adalah bagian dari tepi utara dataran Indo-gangga. dataran terbentuk serta dialiri tiga sungai Himalaya yang besar yakni Kosi, Narayani, dan Karnali, Pahad daerah pegunungan dengan. Ketinggian pegunungan ini bervariasi dengan iklim subtropis, letak geografis ketiga daerah geografis yang sangat ekstrem, dari dataran rendah tropis hingga puncak gunung everest, wilayah Terai (dataran rendah), wilayah Bukit, dan wilayah Pegunungan.

Kondisi geografis pegunungan dan gunung yang tinggi menyebabkan kesulitan dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur jalan, jaringan layanan publik, serta konektivitas antar wilayah. Akses ke layanan pemerintah dan publik di wilayah pegunungan cenderung sulit dan terbatas, berbeda dengan daerah Terai yang lebih mudah dijangkau. Selain itu, Nepal adalah negara terkurung daratan tanpa memiliki wilayah perairan laut, dengan Tipografi ekstrim pegunungan Himalaya, terkurung daratan, dan tantangan politik sosial mempersulit pembangunan infrastruktur merata.

### **Pengaruh Geografis Terhadap Distribusi Layanan Publik dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dan Nepal**

Pemerintahan di Indonesia dalam memberikan pelayanan publik mencakup 38 Provinsi, Keberagaman Pulau dan jumlah yang tersebar dan letak geografis pulau menyebabkan pelayanan publik cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan dan pulau besar, sementara daerah 3T mengalami kekurangan fasilitas, dalam mengurangi disparitas dalam pembangunan infrastruktur Transportasi saat ini yang ada di Indonesia menggunakan Moda Angkutan darat, Angkutan Laut dan Moda udara, melalui moda angkutan laut melalui, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melalui Transformasi program tol laut sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi daerah dengan banyak kemajuan perkembangan, baik dari segi trayek, armada, maupun dampaknya terhadap perekonomian daerah tertinggal, terdepan, terluar, Mengutip dan keterangan Anton (36 tahun), mengatakan bahwa hadirnya tol laut membuat biaya logistik menjadi lebih murah di wilayahnya. Yang termuat di media Elektronik berita satu Imas Damayanti Tol Laut Bikin Warga Bahagia karena Harga Sembako Murah tanggal, melalui program tol laut sebagai jalur konektivitas dan dalam pemenuhan kebutuhan pokok kehadiran transportasi laut yang bersubsidi di 115 pelabuhan yang menjangkau 91 kabupaten dan kota, serta menghubungkan 24 provinsi di Indonesia yang semula 3 trayek kini menjadi 39 trayek sebagai usaha pengurangan disparitas pelayanan publik di daerah 3T.

RAPBN Tahun 2026 kementerian pekerjaan umum dan kementerian terkait lainnya mendapatkan anggaran sebesar Rp 118,5 triliun dengan kenaikan sebesar 37,8% dari tahun sebelumnya hal ini memproyeksikan infrastruktur sebagai instrumen strategis dalam memperkuat daya saing, membuka lapangan kerja, menjaga ketahanan pangan serta energi dan sumber daya air, pembangunan infrastruktur dasar, transportasi darat, wilayah pemukiman penduduk, sekolah dan prasarana strategis lainnya, mengutip dari Industri Konstruksi.com Infrastruktur 2026: Lompatan Strategis untuk Ketahanan Nasional. daftar proyek infrastruktur yang akan dibangun pemerintah pada tahun 2026 : 1) Pembangunan Jalan Nasional 194,75 Km, 2) Preservasi Jalan Nasional 1.507,08 km, 3) Pembangunan Jalan Tol 28,19 Km, 4) Pembangunan Jembatan sepanjang 3.954,74 meter, 5) Pembangunan Flyover/underpass sepanjang 362,71 meter, 6) Pengembangan dua unit bandara, 7) Pengembangan Pelabuhan Patimban (proyek I dan II), 8) Pembangunan Bendungan 15 Bendungan ongoing, 9) Pembangunan Jaringan Irigasi 4.000 Ha, 10) Rehabilitasi Jaringan Irigasi 100.000 Ha.

Ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan dapat memberikan pengaruh terhadap derajat Kesehatan Masyarakat, Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 2023 No. 17 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa fasilitas pelayanan merupakan tempat dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perorangan atau masyarakat. Fasilitas kesehatan utama di Indonesia meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat, klinik, praktik mandiri tenaga kesehatan, dan rumah sakit, data Kemenkes tahun 2023 jumlah fasilitas kesehatan terdapat 3.155 rumah sakit, dengan rincian 2.636 unit rumah sakit umum, 519 unit rumah sakit khusus, 10.180 puskesmas, 14.564 klinik pratama, 697 klinik utama, 12.411 praktik mandiri tenaga medis, 408 Unit Transfusi Darah, 327 laboratorium, 47.078 sarana distribusi kefarmasian serta 394.263 Posyandu. Kondisi geografis yang menantang seperti di wilayah Papua dan daerah pegunungan memberikan dampak terhadap pembangunan dan

pemeliharaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit yang mengakibatkan masyarakat di daerah tersebut mengalami disparitas pelayanan kesehatan yang memadai.

Pemerintahan Nepal mencakup di 7 provinsi dengan topografi pegunungan dan dataran rendah sehingga aksesibilitas terhadap pelayanan publik menyebabkan layanan publik di daerah pegunungan sulit dijangkau, sehingga ada ketimpangan layanan antara wilayah dataran rendah dan pegunungan. Nepal menghadapi keterbatasan dalam pembangunan infrastruktur akibat kondisi geografis pegunungan yang ekstrim. media elektronik *CN Report Construction Nepal : Nepal's Major Construction Projects in 2025: Driving Development Across the Nation* didapatkan Lanskap Pembangunan Infrastruktur nepal tahun 2025 untuk meningkatkan konektivitas, meningkatkan produksi energi, dan meningkatkan fasilitas transportasi berikut daftar nya yakni : 1) Proyek Terowongan Nagdhunga Terowongan Jalan Pertama Nepal Terletak di tepi barat Lembah Kathmandu, adalah terowongan jalan pertama di Nepal, membentang sepanjang 2,68 kilometer, 2) Proyek PLTA Tamakoshi Hulu Memacu Kemandirian Nasional Proyek PLTA Tamakoshi Hulu tetap menjadi tulang punggung sektor energi Nepal pada tahun 2025. 3) Proyek Bandara Dengan kapasitas 456 MW 3 Bandara Internasional Gautam Buddha Siap Lepas Landas Terletak di Bhairahawa, Bandara Internasional Gautam Buddha kini telah beroperasi, berfungsi sebagai gerbang internasional kedua Nepal. Dilengkapi dengan landasan pacu sepanjang 3.000 meter dan teknologi navigasi modern, 4) Jalan Tol Kathmandu-Tarai/Madhesh (Jalur Cepat) jalan tol sepanjang 72,5 km Kathmandu dengan Nijgadh dalam waktu kurang dari satu jam.

Kondisi Geografis negara di Nepal yang didominasi pegunungan dan kondisi infrastruktur yang masih terbatas sangat mempengaruhi distribusi pelayanan kesehatan dan pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan. Ketimpangan antara kota dan daerah terpencil masih nyata, sehingga akses kesehatan bagi masyarakat di wilayah pegunungan sangat menantang. Nepal memiliki sistem pelayanan kesehatan campuran yang terdiri dari fasilitas publik dan swasta. Fasilitas kesehatan di kota-kota besar, terutama di ibukota Kathmandu, relatif lebih maju dengan rumah sakit, klinik, dan pusat diagnostik yang lengkap dan menyediakan layanan medis yang beragam. Namun, di daerah pedesaan dan pegunungan, fasilitas kesehatan sangat terbatas dan akses ke layanan medis menjadi tantangan besar. Banyak fasilitas publik kekurangan staf, peralatan, dan sumber daya, sehingga kualitas layanan tidak merata dan seringkali tidak memadai bagi penduduk di wilayah terpencil. Di negara Nepal memiliki fasilitas kesehatan Rumah Sakit Umum 215, Pusat Pelayanan Kesehatan Primer 187, Puskesmas 3.778, Fasilitas Non-publik 2.551, Pusat Pelayanan Kesehatan Dasar 7.582 Total 14.313. Infrastruktur transportasi yang terbatas di Nepal, khususnya di daerah pedalaman pegunungan, sangat menghambat distribusi pelayanan kesehatan dan pembangunan fasilitas kesehatan baru. Jalan yang terbatas dan kondisi alam yang sulit mempersulit mobilisasi tenaga medis, pengiriman obat-obatan, dan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pendanaan dan infrastruktur gedung yang memadai di banyak fasilitas kesehatan di wilayah pedesaan. Meskipun dengan adanya peningkatan fasilitas baru di daerah terpencil, masih terdapat tantangan infrastruktur yang menjadi hambatan utama untuk pemerataan layanan yang efektif.

kondisi geografis indonesia dan Nepal menyebabkan secara parsial memberikan

dampak Ketimpangan pendistribusian maupun pemerataan aksesibilitas pembangunan Infrastruktur dan pelayanan pelayanan publik secara tidak adil di masing masing wilayah di kedua Negara. Setelah mengamati pengaruh kondisi geografis terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di masing-masing negara, bagian berikut membandingkan indikator empiris antara Indonesia dan Nepal untuk menegaskan perbedaan skala dan pendekatan tata kelola wilayah.

### Perbandingan Negara Indonesia dan Nepal

**Tabel 1. implikasi terhadap pelayanan publik yang ada di Indonesia dan Nepal**

No	Indikator	Kondisi di Indonesia	Kondisi di Nepal	Implikasi terhadap Layanan Publik
1	Kondisi Geografis	Negara kepulauan ( $\pm 17.000$ pulau) dengan jarak antarpulau yang luas. Terdiri dari wilayah daratan dan lautan.	Negara pegunungan tertutup daratan (landlocked), dengan topografi ekstrem dan lembah curam di Pegunungan Himalaya.	Distribusi layanan publik di Indonesia menghadapi kendala logistik antarwilayah. Sedangkan di Nepal, pelayanan publik sulit menjangkau daerah pegunungan terpencil akibat medan berat dan infrastruktur jalan terbatas.
2	Aksesibilitas Transportasi dan Infrastruktur	Infrastruktur relatif maju di Pulau Jawa dan Sumatra, tetapi daerah timur (Papua, Maluku, NTT) masih tertinggal.	Akses jalan terbatas; konektivitas antar wilayah bergantung pada jalur pegunungan atau lembah.	Di Indonesia menghadapi ketimpangan horizontal, yakni perbedaan antarwilayah besar. Sedangkan di Nepal menghadapi ketimpangan vertikal, karena perbedaan ekstrem antara wilayah rendah (Terai) dan tinggi (Himalaya).
3	Konektivitas Digital dan Telekomunikasi	Cakupan internet $\pm 78\%$ populasi, tetapi sinyal di daerah terpencil masih lemah.	Cakupan internet $\pm 55\%$ populasi, dengan ketergantungan tinggi pada wilayah perkotaan seperti Kathmandu.	Di Indonesia digitalisasi layanan publik (e-government) belum menjangkau semua daerah karena infrastruktur digital belum merata. Sedangkan di Nepal, digital divide lebih tajam, menyebabkan masyarakat pedesaan sulit mengakses layanan berbasis daring.

4	Penyediaan Layanan Kesehatan	Sebaran dan jumlah Ketersediaan Fasilitas Kesehatan(2023): 3.155 Rumah Sakit, dengan 2.636 unit rumah sakit umum dan 519 unit rumah sakit khusus, dengan Pelayanan kesehatan dan pendidikan lebih baik di wilayah perkotaan. Wilayah terpencil sering kekurangan tenaga medis dan guru.	Sebaran dan jumlah Fasilitas Kesehatan: Rumah Sakit Umum 215, Pusat Pelayanan Kesehatan Primer 187, Puskesmas 3.778, Fasilitas Non-publik 2.551, Pusat Pelayanan Kesehatan Dasar 7.582 Total 14.313, Fasilitas publik, terkonsentrasi di dataran rendah dan ibu kota; daerah pegunungan sulit dijangkau ambulans atau sekolah.	Di Indonesia menghadapi masalah mobilitas tenaga layanan publik ke daerah terpencil. Sedangkan di Nepal menghadapi keterisolasian geografis, sehingga layanan harus dilakukan berbasis komunitas lokal ( <i>community-based service</i> ).
5	Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi	GDP per kapita USD 4.958 (2024) dan pertumbuhan 5,0%.	GDP per kapita USD 1.445 (2024) dan pertumbuhan 3,7%.	Wilayah di Indonesia punya kapasitas fiskal lebih besar untuk mendanai infrastruktur sosial. Sedangkan wilayah di Nepal masih bergantung pada bantuan luar negeri untuk proyek layanan publik.
6	Kebijakan Pemerataan	Pemerintah menjalankan program Tol Laut, Dana Desa, dan pembangunan konektivitas 3T.	Pemerintah mengembangkan proyek jalan tol Kathmandu Terai dan PLTA untuk energi wilayah terpencil.	Kedua negara mengarah ke <i>territorial governance</i> , yakni penyesuaian kebijakan berdasarkan karakter wilayah. Namun di Indonesia lebih fokus pada interkoneksi pulau, sedangkan di Nepal pada konektivitas antar-lembah dan akses energi.

### 1. Tujuan pembangunan berkelanjutan

Menurut laporan SDGs, peringkat Indonesia dalam pencapaian SDGs melonjak dari posisi 102 pada 2019 menjadi peringkat 75 pada 2023 dari 166 Negara. Sedangkan menurut laporan di tahun 2025 Indonesia berada pada peringkat 75 dari 167 Negara dengan 70.22 dengan sumber informasi dari website resmi SDG Transformation Center sustainable-development-report-2025. Serta status SDGs di Nepal pada tahun 2023 meraih 66.5 dan berada di peringkat 99 dari 166 Negara, dan di tahun 2023 ditahun 2025 menurut SDGs Nepal berada di peringkat 85 dari 167 negara meraih nilai sebesar 68.58 sumber informasi website SDG Transformation Center sustainable-development-report-2025.

## 2. Tingkat Pertumbuhan dan Pendapatan perkapita

Pertumbuhan Perkapita Indonesia (GDP) sebesar 5,0 % di tahun 2024 dengan pendapatan (GDP Perkapita) sebesar \$4,958 dan Nepal Pertumbuhan (GDP) Nepal sebesar 3.7 % di tahun 2024 dengan pendapatan (GDP Perkapita) \$1,445.

## 3. Tingkat Pertumbuhan Pembangunan manusia

Tingkat Pertumbuhan pembangunan Manusia menurut data UNDP, Indonesia pada peringkat 113 nilai 0.728 dan Nepal peringkat 145 dengan Nilai 0.622.

**Tabel 2. Perbandingan Indonesia dan Nepal**

NO	KATEGORI	INDONESIA	NEPAL
1	Luas Wilayah	1,916,907 km <sup>2</sup>	147,180 km <sup>2</sup>
2	Populasi	281.604.000	29.695.000 Jiwa
3	Indeks SDGs	Peringkat 75 dari 167 Negara (tahun 2025)	Peringkat 85 dari 167 Negara (tahun 2025)
4	Pendapatan Perkapita	\$4,958 ( tahun 2024)	\$1,445. ( tahun 2024)
5	Pertumbuhan Perkapita	5,0 % ( tahun 2024)	3.7 % ( tahun 2024)
6	Pertumbuhan Pembangunan Manusia	Peringkat 113 nilai 0.728	145 dengan Nilai 0.622
7	Pertumbuhan Pembangunan Manusia	Peringkat 113 nilai 0.728	145 dengan Nilai 0.622

Menurut Teori Brenner (2004), *territorial governance* adalah cara negara mengatur, mengelola, dan mengkoordinasikan pembangunan publik berdasarkan karakteristik spasial wilayah, meliputi (1) kondisi geografis dan topografi, (2) kapasitas institusional daerah, (3) aksesibilitas terhadap pelayanan publik, dan (4) partisipasi aktor lokal dalam pengambilan keputusan. Kondisi Geografis dengan negara kepulauan menuntut tata kelola berbasis wilayah laut dan pulau kecil tata kelola kepulauan, sementara Nepal dengan negara pegunungan *locked area* memerlukan tata kelola lintas-lembah dan pegunungan tata kelola wilayah pegunungan, Indonesia dengan kebijakan tol laut, pembangunan pelabuhan, jembatan antar pulau, distribusi pelayanan 3T hal ini Penerapan *Territorial governance* yang menyesuaikan bentuk ruang kepulauan. Sedangkan di Nepal proyek terowongan Nagdhunga, jalan tol Kathmandu-Terai, PLTA Tamakoshi Hulu Menunjukkan penerapan *territorial governance* yang menyesuaikan dengan tata kelola di ruang vertikal di daerah pegunungan. Kedua negara berupaya membangun sistem pelayanan publik yang “spatially adaptive”, sesuai kerangka *territorial governance*. Namun, efektivitasnya bergantung pada kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah. Hal ini memberikan dampak pada Pergeseran nilai yang terjadi di Indonesia bersifat fungsional dan fiskal, sementara di Nepal spasial dan federal, sesuai karakter topografinya. *territorial Governance*

## Aksesibilitas terhadap pelayanan publik

Tingkat disparitas dalam memperoleh aksesibilitas pelayanan publik di wilayah 3T Indonesia dan wilayah pegunungan Nepal masih mencerminkan ketimpangan spasial yang belum sepenuhnya diatasi oleh kebijakan pembangunan nasional di kedua Negara dengan kondisi geografis di mana ruang geografis menjadi faktor pembeda utama dalam memperoleh

hak dasar dalam pelayanan publik yang dimana kebijakan publik yang adil harus memastikan redistribusi akses layanan dan konektivitas antarwilayah.

### **Kapasitas institusional daerah dan partisipasi aktor lokal dalam pengambilan keputusan.**

Pergeseran pengambilan keputusan yang semula menerapkan Sentralisasi melalui Penerapan Kebijakan Tol Laut di Indonesia menggambarkan kapasitas daerah dengan aktor pengambil keputusan di tingkat lokal dalam penyusunan kebijakan infrastruktur berbasis lokal mencerminkan pendistribusian fungsional kewenangan menjadi desentralisasi dalam pengambilan keputusan yang melibatkan aktor lokal dan komunitas guna distribusi pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir dan kepulauan hal ini mencerminkan transformasi pergeseran dari sistem terpusat menuju struktur multi-level yang menyesuaikan konteks ruang dan fungsi dimana Indonesia memperlihatkan bentuk pergeseran nilai melalui desentralisasi administratif dan fiskal pada kebijakan *Tol Laut*. sedangkan di Nepal Partisipasi komunitas lokal melalui federalisasi yang menyesuaikan tata kelola publik dengan geografis pegunungan seperti proyek seperti Tamakoshi Hydropower dan pembangunan jalan tol Kathmandu–Terai menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat berperan penting dalam mengadaptasi kebijakan terhadap konteks topografi ekstrem, kedua Negara telah menerapkan Adaptif territorial governance dengan kapasitas kelembagaan yang berbeda.

### **KESIMPULAN**

Kondisi geografis yang sangat berbeda antara Indonesia dan Nepal memberikan tantangan khas dalam distribusi layanan publik dan pembangunan infrastruktur, di mana Indonesia menghadapi tantangan kepulauan yang luas dan terfragmentasi, sementara Nepal menghadapi tantangan pegunungan dan keterbatasan akses daratan. Meskipun kedua negara sama-sama berusaha meningkatkan infrastruktur dan letak geografis kedua negara mempengaruhi terhadap tingkat dan jenis serta aksesibilitas pelayanan publik di kedua negara sesuai dengan kapasitas dan tantangan masing-masing di kedua Negara. Hasil menunjukkan bahwa kondisi kepulauan Indonesia menimbulkan disparitas pelayanan publik antar wilayah 3T, sementara topografi pegunungan Nepal menyebabkan keterlambatan pembangunan infrastruktur dasar. Keduanya memerlukan kebijakan tata kelola wilayah adaptif berbasis geografis.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Acharya, K. K. (2018). *Local governance restructuring in Nepal: From government to governmentality*. *Dhaulagiri Journal of Sociology and Anthropology*, 12, 37–47.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Statistik Indonesia 2025*. Badan Pusat Statistik.
- Bappenas (Kementerian PPN/Bappenas). (2023). *Ringkasan rencana kerja pemerintah tahun 2023: Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas (Kementerian PPN/Bappenas). (2023). *RPJMN 2020–2024: Ringkasan rencana kerja*

- pemerintah tahun 2023 – Laporan ketahanan dan infrastruktur*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Brenner, N. (2004). *New state spaces: Urban governance and the rescaling of statehood*. Oxford University Press.
- Construction Nepal. (2025, April 15). *Nepal's major construction projects in 2025: Driving development across the nation*. <https://constructionnepal.com/2025/04/15/nepals-major-construction-projects-in-2025-driving-development-across-the-nation/>
- Indonesia.go.id. (n.d.). *Indonesia di jalan menuju SDGs 2030*. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8618/indonesia-di-jalan-menuju-sdgs-2030->
- Industri konstruksi.com. (2025). *Infrastruktur 2026: Lompatan strategis PUPR untuk ketahanan nasional*. <https://industrikonstruksi.com/infrastruktur-2026-lompatan-strategis-pupr-untuk-ketahanan-nasional/>
- International Telecommunication Union (ITU). (2024). *Measuring digital development: Facts and figures 2024*. Geneva: ITU Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Sachs, J. D., Lafortune, G., Fuller, G., & Jablonovski, G. (2025). *Sustainable development report 2025: Financing sustainable development to 2030 and mid-century*. Sustainable Development Solutions Network (SDSN) / University Press.
- Shrestha, B., & Pandey, R. (2020). Transport infrastructure and accessibility in Nepal: Challenges and policy options. *Journal of Mountain Studies*, 12(2), 45–63.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Territorial Governance Frameworks for Inclusive Public Services*. Geneva: UNDP Regional Bureau for Asia.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2025). *Human development report 2025*. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2025>
- World Atlas. (n.d.). *Geography and country profiles*. <https://www.worldatlas.com/>
- World Bank. (2024). *World development indicators: Access to safe water*. <https://data.worldbank.org/>
- World Data Lab. (2025). *Sustainable development report 2025*. <https://sdgtransformationcenter.org/reports/sustainable-development-report-2025>
- Data Indonesia id(2023): Kumpulan Data Fasilitas Kesehatan di Indonesia 5 Tahun Terakhir hingga 2023 <https://dataindonesia.id/>
- Public Health Concern Nepal (PHC-Nepal) : 20 major Health Indicator of Nepal You Need TO Know <https://phcnepal.com/>